



RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019



**INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2018



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420
PAINAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 700/035/KPTS/INSP/2018

TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisiran Selatan, perlu disusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang akan menjadi pedoman dalam

pelaksanaan program dan kegiatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 08 Juni 2018

**INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Drs. YESPI NWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2019, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2019.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja Tahunan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 8 Juni 2018
INSPEKTUR
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Drs. YESPI NAWIARSIH
NIP. 19681017 198903 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.3.1 Analisis tingkat kinerja	13
2.3.2 Permasalahan	14
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	14
2.3.4 Tantang dan Peluang	15
2.3.5 Formulasi Isu-Isu Strategis	16
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22

	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	23
	3.3 Program dan Kegiatan	24
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	30
	KABUPATEN PESIIR SELATAN	
BAB V	PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2018 Kabupaten Pesisir Selatan	7
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	12
Tabel 2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan	18
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019	21
Tabel 3.1. Agenda RPJMN Tahun 2015-2019 yang terkait Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	22
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	24
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Hubungan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJMN dan SDGS	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2019, yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra yang telah ditetapkan telah ditinjau kembali dengan disusunnya Revisi Renstra Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 pada Tahun 2018, untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), penyesuaian untuk mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan pembangunan. Dan perubahan aturan tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di bidang pengawsan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Revisi Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Penyusunan Renja juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah ditingkat provinsi dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

Untuk itu perumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan ditingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah kabupaten dan program perangkat daerah ditingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renja untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan Kementerian Dalam Negeri ditingkat pusat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural inspektorat.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2019 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan PD dan Rencana Kerja Anggaran PD.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB I** **Pendahuluan**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II** **Hasil Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Tahun Lalu**
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat
 - 2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III** **Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**
 - 3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.3 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahunan Inspektorat
 - 3.4 Program dan kegiatan
- BAB IV** **Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat kabupaten Pesisir Selatan**
- BAB V** **Penutup**

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 senilai Rp3.384.658.817 terdiri dari 5 (lima) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan, realisasi anggaran senilai Rp3.169.324.455 untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara 91-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara 75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara 65-74%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-64%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2017 terdapat 23 kegiatan yang dengan status capaian "Sangat Tinggi" (88,47%), 2 kegiatan dengan status capaian "Tinggi" (7,69%), dan 1 kegiatan dengan status capaian "Sedang" (3,84%). Kegiatan dengan capaian kinerja keuangan sedang adalah Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, karena ada penambahan dana pada Anggaran Perubahan, tetapi sampai akhir tahun tidak ada lagi pemanggilan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP dan Badan Diklat terakreditasi. Dan untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 sebagaimana berikut :

Tabel 2.1
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN PERANGKAT DAERAH DAN
 PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2018
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Ketuntasan Kegiatan s.d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(8+7-9)	11=(10/4)				
3	00	01	01	Program Pelayanan Adm Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran		-							
3	00	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Tagihan Rekening listrik, telepon dan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100.00
3	00	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100.00
3	00	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah sarana Kebersihan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100.00
3	00	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100.00
3	00	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100.00
3	00	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100.00
3	00	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100.00
3	00	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat Kabar dan Buku Per-UU	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100.00
3	00	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100.00
3	00	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100.00

3	00	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur													
3	00	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100		
3	00	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100		
3	00	01	02	22	Pemel. Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100		
3	00	01	02		Pembangunan Toilet	Jumlah Septictank dan MCK	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100		
3	00	01	02	24	Pemel. Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100		
3	00				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur													
3	00				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan		50 stel	0 0	0 0	#DIV/0!	0 0	0 0	#DIV/0!	0 0	0 0	#DIV/0!		
3	00				Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	57 Stel	- -	0 0	0 0	#DIV/0!	0 0	0 0	#DIV/0!	0 0	0 0	#DIV/0!		
	00	01			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia													
3	00	01			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	14 orang	6 Orang	11 Orang	8 Orang	72.72727	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	#DIV/0!		
3	00	01	20		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur													
dd	00	01	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Pengawasan Internal secara Berkala	220 Obrik	345 Obrik	244 Obrik	244 Obrik	100	220 Obrik	200 Obrik	90.91					

3	00	01	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Jumlah kasus pengaduan di lingkungan Pemerintahan Daerah	45 kasus/khusus	262 kasus/khusus	50 kasus/khusus	474 kasus/khusus	948	45 kasus/khusus	87 kasus/khusus	193.33
3	00	01	20	05	Inventarisasi temuan Pengawasan	Jumlah temuan pengawasan yang telah terinventarisir	1,500 Temuan	1,126 Temuan	1,500 Temuan	1,153 Temuan	76.86667	1,500 Temuan	456 Temuan	30.40
					Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LKPD yang dievaluasi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100.00
3	00	01	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Hasil Temuan Pengawasan yang telah ditindak lanjuti	1,500 Temuan	751 Temuan	1,500 Temuan	851 Temuan	57	1,500 Temuan	145 Temuan	9.67
					Pelaksanaan Matuitas SPIP	Jumlah OPD yang mengimplemtasikan SPIP	45 OPD	- OPD	- OPD	- OPD	#DIV/0!	- OPD	- OPD	#DIV/0!
					Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Jumlah LKj OPD yang dievaluasi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100.00
					Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah RKA Awal dan Perubahan yang dievaluasi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100.00
					Evaluasi RPJMD	Jumlah RPJMD yang direviu		1 laporan						
					Review Dokumen Perencanaan dan Laporan	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), PPRG dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang direview	1 laporan	- -	- -	- -	#DIV/0!	- -	- -	#DIV/0!
					Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah LKj, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja dan Pengadaan Baang dan Jasa Pemerintah PD yang dievaluasi	1 laporan	- -	- -	- -	#DIV/0!	- -	- -	#DIV/0!
3	00	01	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur	Peningkatan Level APIP (Aparat Pegawai Intern Pemerintahan)		-						
3	00	01	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	51 orang	26 orang	53 orang	34 orang	64	53 orang	24 orang	45.28
3	00	01	21	03	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan Pada Kantor Sendiri	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	- Kegiatan	#DIV/0!

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dengan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu yaitu penyelenggaraan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 2 program utama yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2017, realisasi capaian kinerja jumlah pengawasan tahunan pada tahun 2017 sejumlah 244 obrik target dan terealisasi 244 obrik atau tercapai 100 %. Untuk persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada tahun 2017 yaitu tindak lanjut hasil temuan BPK tercapai 88,23 % dari target 90 % atau realisasinya 98,08 % dan untuk tindak lanjut hasil temuan Inspektorat tercapai 73,80 % dari target 90 % atau realisasinya sebesar 81,53 %.

Untuk Opini Laporan Keuangan WTP dari BPK pada Tahun 2017 tercapai dengan prestasi predikat opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dikeluarkan BPK pada awal tahun 2018. Kinerja yang rendah pencapaiannya adalah penyelesaiannya tindak lanjut temuan pengawasan, level kapabilitas APIP dan Persentase OPD yang mendapat nilai katagori SAKIP minimal bernilai B, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus dalam peningkatan kinerja pelayanan ke depan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Inspektorat sebagai pengawas internal di daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan sekaligus sebagai tolak ukur Inspektorat dalam pencapain kinerja, hal ini dapat dilihat pada table 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KABUPATEN PESIRIS SELATAN**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
1	OPINI BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Jumlah Pengawasan Internal secara Berkala	244 obrik	220 obrik	220 obrik	220 obrik	244 obrik	200 obrik	160 obrik	160 obrik	
			Jumlah kasus pengaduan dilingkungan Pemerintahan Daerah	50 kasus	45 kasus	45 kasus	45 kasus	474 kasus	87 kasus	150 kasus	150 kasus	
			Jumlah temuan pengawasan yang telah terinventarisir	1800 temuan	1500 Temuan	1500 Temuan	1500 Temuan	1.153 Temuan	456 Temuan	1500 temuan	1500 temuan	
2	Rata-rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP)		Jumlah LKj PD yang dievaluasi	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	
3	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah		Jumlah APIP yang mengikuti Diklat	40 orang	50 orang	55 orang	60 orang	34 orang	24 orang	51 orang	55 orang	
			Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	2 Angkatan	
			Jumlah LKPD yang dievaluasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Jumlah Hasil Temuan Pengawasan yang telah ditindak lanjuti	1800 Temuan	1500 Temuan	1500 Temuan	1500 Temuan	851 Temuan	145 Temuan	1500 Temuan	1500 Temuan	
			Jumlah RPJMD yang direviu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
			Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), PPRG dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang direview	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	
			Jumlah LKj, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja dan Pengadaan Baang dan Jasa Pemerintah PD yang dievaluasi	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	
4	Level Maturitas		Jumlah OPD yang mengimplementasikan SPIP	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis tingkat kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut, Inspektorat mendukung pencapaian Misi “Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsife dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam pencapaian tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja”, sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah”, salah satu indikator yang sudah tercapai yaitu opini WTP atas LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017. Indikator yang masih harus ditingkatkan capaiannya adalah Level Kapabilitas APIP. Tantangan untuk Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 adalah mempertahankan capaian opini WTP atas LKPD dan meningkatkan Kapabilitas APIP.

Kinerja Inspektorat secara kelembagaan dapat dinilai dari tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kapabilitas APIP merupakan penilaian kemampuan APIP berdasarkan kriteria Internal Audit Capability Model (IACM) yang mengelompokan Kapabilitas APIP ke dalam level yaitu level 1 (initial), level 2 (Infrastructure), level 3 (Integrated), level 4 (Managed) dan level 5 (Optimizing). Sesuai dengan target RPJMN 2015-2019. Kapabilitas APIP pada akhir tahun 2019 harus mencapai level 3. Untuk itu Inspektorat selaku APIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya-upaya meningkatkan Kapabilitas dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Hasil yang telah dicapai pada Tahun 2017. Inspektorat Kabupaten telah berada pada level 2 dengan catatan berdasarkan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP BPKP Nomor : LHE455/PW03/3/2015 dan ditargetkan mencapai level 3 pada tahun 2018.

2.3.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat inidengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa dating dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan yang dihadapi pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Masih belum seimbangny jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaaan baik pemeriksaan regular maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemerksaan (TLHP).
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan (KKN).

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi

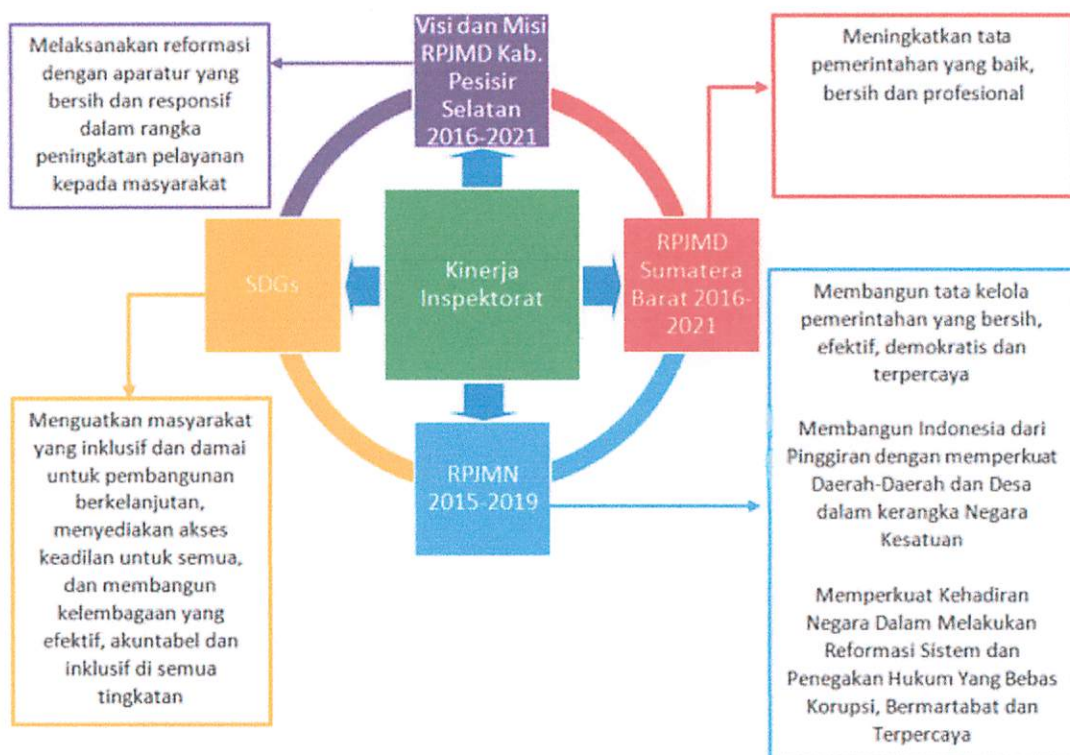
Pengawasan Intern Pemerintah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat sebagai salah satu fungsi manajemen organisasi pemerintahan memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govermance). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik. Inspektorat selaku APIP akan berdampak langsung pada kinerja reformasi birokrasi dan upaya pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Kinerja Inspektorat berdampak pada pencapaian Misi “Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan pencapaian Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, kinerja Inspektorat berdampak pada pencapaian agenda nasional “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”.”Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan “ dan agenda “Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas

Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya”. Terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kinerja Inspektorat berdampak pada pencapaian tujuan 16, yaitu ”Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan dan sasaran secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Hubungan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJMN dan SDGs dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1

Hubungan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provisi Sumatera Barat, RPJMN dan SDGs



2.3.4 Tantangan dan Peluang

Dalam pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Tantangan pengembangan dan pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

3. Rendahnya pemahaman dan animo OPD/auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Belum terpadunya Sistem Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
5. Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat dalam pengawasan pemerintahan daerah.
2. Adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah terhadap keberadaan Inspektorat.
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat.
4. Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap Inspektorat dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah.
5. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah terhadap pengawasan.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Strategis

Dalam upaya melakukan misi Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Maturitas SPIP, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta menyusun program prioritas Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan, maka perumusan isu-isu strategis adalah :

1. Peningkatan mutu aparatur pengawasan.
2. Sistem Pengendalian Interen dapat dilaksanakan dimasing-masing unit kerja.
3. Peningkatan Pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2018, maka Rencana Kerja Tahun 2019 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan Rencana Kerja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Renstra Inspektorat tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2018. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.027.000.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Cakupan Pelayanan		592.620.50	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pessel	Jumlah Tagihan Rekening listrik, telepon dan air	12 bulan	75.500.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pessel	Jumlah Tagihan Rekening listrik, telepon dan air	12 bulan	49.420.50	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Pessel	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	81.000.00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Pessel	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	12 bulan	91.800.00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Pessel	Jumlah sarana Kebersihan	12 bulan	72.500.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Pessel	Jumlah sarana Kebersihan	12 bulan	61.205.00	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab. Pessel	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	45.500.00	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kab. Pessel	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	24.300.00	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Pessel	Jumlah ATK	12 bulan	75.500.00	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Pessel	Jumlah ATK	12 bulan	41.807.00	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pessel	Jumlah cetakan penggandaan	12 bulan	55.500.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Pessel	Jumlah cetakan p	12 bulan	28.220.00	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pessel	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 bulan	35.500.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pessel	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	12 bulan	12.738.00	
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan dan Perundang-undangan	Kab. Pessel	Jumlah surat Kabar dan Buku Per-UU	12 bulan	25.500.00	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan dan Perundang-undangan	Kab. Pessel	Jumlah surat Kabar dan Buku Per-UU	12 bulan	6.900.00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Pessel	Jumlah biaya jaman makan dan minum	12 bulan	55.500.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Pessel	Jumlah biaya jamuan makan dan minum	12 bulan	42.205.00	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti luar daerah	12 bulan	340.000.00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti luar daerah	12 bulan	143.175.00	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dalam daerah	12 bulan	125.000.00	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kab. Pessel	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti dalam daerah	12 bulan	50.850.00	
12	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Kab. Pessel	Jumlah informasi pembangunan yang disampaikan	12 bulan	40.000.00	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Kab. Pessel	Jumlah informasi pembangunan yang disampaikan	12 bulan	40.000.00	

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur	12 bulan	460.000.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur	12 bulan	553.000.00	
13	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Pessel	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Printer	60.000.00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Pessel	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Printer	20.000.00	
14	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Pessel	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Mesin Fotokopy, Scanner, Papan Pengumuman, Meja dan Kursi Esselon III dan Staf, lemari	75.000.00	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Pessel	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Mesin Fotokopy, Scanner, Papan Pengumuman, Meja dan Kursi Esselon III dan Staf, lemari arsip	171.500.00	
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Pessel	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Plank Nama PD	125.000.00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Pessel	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Plank Nama PD	20.000.00	
16	Pembangunan Toilet	Kab. Pessel	Jumlah Septictank dan MCK	Toilet	-	Pembangunan Toilet	Kab. Pessel	Jumlah Septictank dan MCK	Toilet	100.000.00	
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Pessel	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 unit kendaraan roda empat, 5 unit kendaraan roda dua	200.000.00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Pessel	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 unit kendaraan roda empat, 5 unit kendaraan roda dua	241.500.00	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Pessel	Persentase Aparatur yang kompeten		65.500.00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Pessel	Persentase Aparatur yang kompeten		22.800.00	
18	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Pessel	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	57 stel	65.500.00	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Pessel	Jumlah Pengadaan Pakaian	57 stel	22.800.00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Pessel		bulan	50.000.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Pessel		bulan	25.000.00	
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Pessel	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	14 orang	50.000.00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Pessel	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	14 orang	25.000.00	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kab. Pessel	Persentase Aparatur Pengawasan Internal		4.237.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kab. Pessel	Persentase Aparatur Pengawasan Internal		2.475.880	
20	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Internal secara Berkala	160 obrik	1.650.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Kab. Pessel	Jumlah Pengawasan Internal secara Berkala	160 obrik	1.455.000	
21	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kab. Pessel	Jumlah kasus pengaduan di lingkungan	45 kasus	655.000	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Kab. Pessel	Jumlah kasus pengaduan	45 kasus	370.000	
22	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Kab. Pessel	Jumlah temuan pengawasan yang telah	1.500 temuan	55.500	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Kab. Pessel	Jumlah temuan	1.500 temuan	30.000	
23	Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kab. Pessel	Jumlah Hasil Temuan Pengawasan yang telah	1.500 temuan	1.550.000	Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kab. Pessel	Jumlah Hasil Temuan	1.500 temuan	458.380	
24	Pelaksanaan Maturitas SPIP	Kab. Pessel	Jumlah Obrik yang mengimplementasikan Maturitas SPIP	45 OPD	111.000	Pelaksanaan Maturitas SPIP	Kab. Pessel	Jumlah Obrik yang mengimplementasikan Maturitas SPIP	45 OPD	37.500	

25	Review Dokumen Perencanaan dan Laporan	Kab. Pessel	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), PPRG dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang direview	45 OPD	95.500	Review Dokumen Perencanaan dan Laporan	Kab. Pessel	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), PPRG dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang direview	45 OPD	75.000	
26	Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Kab. Pessel	Jumlah LKj, Kinerja dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perangkat Daerah yang di evaluasi	45 OPD	120.000	Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Kab. Pessel	Jumlah LKj, Kinerja dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perangkat Daerah yang di evaluasi	45 OPD	50.000	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Peningkatan Level APIP		375.000	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Peningkatan		268.500	
27	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kab. Pessel	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	51 orang	300.000	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kab. Pessel	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	51 orang	238.500	
28	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	Kab. Pessel	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	110 orang (2 angkatan)	75.000	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	Kab. Pessel	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan	110 orang (2 angkatan)	30.000	
					6.214.500					3.937.800	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TIDAK ADA USULAN					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah mendukung beberapa agenda Pembangunan Nasional sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Agenda RPJMN Tahun 2015-2019 yang terkait Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

No.	Agenda	Sub Agenda	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya	Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
		Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)	Meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional diberbagai bidang
2.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara	Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah • Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah • Meningkatkan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah
3.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Mencegah dan Memberantas Korupsi;	Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan

Dalam RPJMN tersebut juga disebutkan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam “Nawa Cita”, Pada Nawa Cita kedua, “Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya” dilakukan diantaranya dengan mengoptimalisasikan keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan kelembagaan pengelolaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) agar lebih efektif dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional dan pelaksanaannya.

Kebijakan Nasional terkait bidang pengawasan juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Dokumen perencanaan dan penganggaran.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun di dasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi.

Tujuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja.

Pada Tahun 2019 yang akan datang sasaran pengawasan yang akan dicapai, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran

kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Sasaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja :
 - a. Opini BPK.
 - b. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator kinerja :
 - a. Level Kapabilitas APIP.
3. Meningkatnya Maturitas SPIP dengan indikator kinerja :
 - a. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah..

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Tujuan, Sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintahan Daerah	1. Opini BPK	WTP
			2. Rata-Rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB
		2. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	3
		3. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level Maturitas SPIP Pemda	3

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-Faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dalam Misi “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”
- b. Mendukung percepatan Sustainable Development Goals (SDGs) kinerja pada tujuan 16 yaitu memperjuangkan masyarakat yang amanat dan inklusi, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif pada semua tingkat.
- c. Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Perumusan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam Renja ini Inspektorat melaksanakan 7 program 30 kegiatan dengan jumlah total dana Pagu indikatif sebesar Rp4.054.560.000. Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan kecuali untuk kegiatan rapat koordinasi serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di luar daerah. Dari total dana pagu indikatif sebesar Rp4.054.560.000 tersebut, seluruhnya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana strategik dalam mencapai tujuan yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Program dan Kegiatan tersebut yaitu :

1. Program Adminstrasi Perkantoran :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dara Air dan Listrik.
 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 8. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 9. Penyediaan Makanan dan Minuman
 10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
 12. Penyebarluasan Informasi Pembangunan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
 13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 15. Pengadaan Mobiler.
 16. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor.
 17. Pembangunan Toilet.
 18. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
 19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Hari Tertentu.
4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur :
 20. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan :
 21. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.
 22. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda.
 23. Inventarisasi Temuan Pengawasan.
 24. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 25. Pelaksanaan Maturitas SPIP.
 26. Review Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan.
 27. Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan.

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
 28. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan baik pengembangan terhadap Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) maupun Pejabat Fungsional Auditor ; dan
 29. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).
7. Program Pengembangan Data/Informasi.
 30. Penyebarluasan Informasi Pembangunan.

Masing-masing Program dan Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)				
			4	5	6	7		9	10				
3	00	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran			592.620.500,00			1.088.000.000,00		
3	00	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening listrik, telepon dan air	Kab. Pessel	12 bulan	49.420.500,00	APBD		12 bulan	78.000.000,00
3	00	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah biaya honorarium pengelola keuangan	Kab. Pessel	12 bulan	91.800.000,00	APBD		12 bulan	85.000.000,00
3	00	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah sarana Kebersihan	Kab. Pessel	12 bulan	61.205.000,00	APBD		12 bulan	75.000.000,00
3	00	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Kab. Pessel	12 bulan	24.300.000,00	APBD		12 bulan	50.000.000,00
3	00	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	Kab. Pessel	12 bulan	41.807.000,00	APBD		12 bulan	80.000.000,00
3	00	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan penggandaan	Kab. Pessel	12 bulan	28.220.000,00	APBD		12 bulan	60.000.000,00
3	00	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan	Kab. Pessel	12 bulan	12.738.000,00	APBD		12 bulan	40.000.000,00
3	00	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Penaturan dan Perundang-undangan	Jumlah surat Kabar dan Buku Per-UU	Kab. Pessel	12 bulan	6.900.000,00	APBD		12 bulan	30.000.000,00
3	00	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum	Kab. Pessel	12 bulan	42.205.000,00	APBD		12 bulan	60.000.000,00
3	00	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti luar daerah	Kab. Pessel	12 bulan	143.175.000,00	APBD		12 bulan	350.000.000,00
3	00	01	01	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Kosultasi yang diikuti dalam daerah	Kab. Pessel	12 bulan	50.850.000,00	APBD		12 bulan	130.000.000,00
3	00	01	01	40	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Jumlah informasi pembangunan yang disampaikan	Kab. Pessel	2 Kegiatan	40.000.000,00	APBD		2 Kegiatan	50.000.000,00
3	00	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana penunjang			553.000.000,00					640.000.000,00
3	00	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Pessel	Printer	20.000.000,00	APBD		1 Paket	70.000.000,00
3	00	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Pessel	Mesin Fotokopy, Scanner, Papan Pengumuman	110.000.000,00	APBD		1 Paket	80.000.000,00
3	00	01	02		Pengadaan Mobiler	Jumlah pengadaan mobiler	Kab. Pessel	Meja dan Kursi Esselon III dan Staf, lemari arsip	61.500.000,00	APBD		1 Paket	80.000.000,00
3	00	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kab. Pessel	Plank Nama PD	20.000.000,00	APBD		1 Paket	200.000.000,00
3	00	01	02		Pembangunan Toilet	Jumlah Septictank dan MCK	Kab. Pessel	Toilet	100.000.000,00	APBD		-	-
3	00	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	Kab. Pessel	4 unit kendaraan roda empat, 5 unit kendaraan roda dua	241.500.000,00	APBD		4 unit kendaraan roda empat, 5	210.000.000,00
3	00	01		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang baik		Kab. Pessel		22.800.000,00				70.000.000,00
3	00	01		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu		Kab. Pessel	57 stel	22.800.000,00	APBD		50 stel	70.000.000,00

3	00	01			Program Peningktn.Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang kompeten	Kab. Pessel		25.000.000,00				50.000.000,00
3	00	01			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Pessel	14 orang	25.000.000,00	APBD		16 orang	50.000.000,00
3	00	01	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Aparatur Pengawasan yang kompeten dan profesional	Kab. Pessel		2.475.879.500				4.276.000.000
3	00	01	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Pengawasan Internal secara Berkala	Kab. Pessel	160 obrik	1.455.000.000	APBD		120 obrik	1.700.000.000
3	00	01	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus pengaduan di lingkungan Pemerintahan Daerah	Kab. Pessel	45 kasus	370.000.000	APBD		45 kasus	700.000.000
3	00	01	20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah temuan pengawasan yang telah terinventarisir	Kab. Pessel	1.500 temuan	30.000.000	APBD		1.500 temuan	56.000.000
3	00	01	20	06	Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Hasil Temuan Pengawasan yang telh ditindak lanjuti	Kab. Pessel	1.500 temuan	458.379.500	APBD		1.500 temuan	1.600.000.000
3	00	01	20		Pelaksanaan Maturitas SPIP	Jumlah Obrik yang mengimplementasikan Maturitas SPIP	Kab. Pessel	45 OPD	37.500.000	APBD		45 OPD	120.000.000
3	00	01	20		Review Dokumen Perencanaan dan Laporan	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), PPRG dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang direview	Kab. Pessel	45 OPD	75.000.000	APBD		45 OPD	100.000.000
3	00	01	20		Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	Jumlah LKj, Kinerja dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perangkat Daerah yang di evaluasi	Kab. Pessel	45 OPD	50.000.000	APBD		45 OPD	135.000.000
3	00	01	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Peningkatan Level APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)	Kab. Pessel		346.340.000				491.000.000
3	00	01	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti diklat	Kab. Pessel	51 orang	238.500.000	APBD		51 orang	325.000.000
3	00	01	21	03	Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri	Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	Kab. Pessel	110 orang (2 angkatan)	30.000.000	APBD		110 orang (2 angkatan)	80.000.000
3	00	02	15		Program Pengembangan data/Informasi	Terinformasikannya program pembangunan	Kab. Pessel		38.920.000	APBD			43.000.000
3	00	2	15	11	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Jumlah data yang terinformasikan	Kab. Pessel	2 Paket	38.920.000	APBD		2 Paket	43.000.000
					Total Rencana Anggaran.....				4.054.560.000				6.658.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra serta Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Indikator Kinerja dari kedua program tersebut menjadi tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam evaluasi RKPD dan LKj.

Dalam Renja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 terdapat 6 Program dan 29 Kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V

PENUTUP

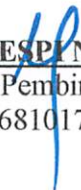
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasana kerja.

Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Revisi Renstra dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi dan perspektif Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu di dukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami agar dokumen Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi pada Pemerintah

Kabupaten Pesisir Selatan. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

Painan, 8 Juni 2018
INSPEKTUR,


Drs. YESPI NAWIARSIH
Pembina Tk.I
NIP. 19681017 198903 1 003